



Judul : Penyebaran konten radikalisme naik, 174 akun diputus
Tanggal : Jumat, 01 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

MEDIA
INDONESIA

Penyebaran Konten Radikalisme Naik, 174 Akun Diputus

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutus akses terhadap 174 akun dan konten di internet yang terindikasi memuat aktivitas indoktrinasi ataupun radikalisme. Pemutusan akses dilakukan sepanjang Juli-Agustus 2023.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) untuk meningkatkan pemantauan di platform digital yang memuat konten radikalisme dan terorisme.

Selama kolaborasi itu berlangsung, tim dari ketiga instansi tersebut menemukan adanya penyebaran konten radikalisme dari beberapa kelompok yang radikal.

"Hasil pantauan bersama TNI dan BNPT menunjukkan peningkatan signifikan penyebaran konten radikalisme. Ada yang terafiliasi Jemaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI)," kata Budi.

Dari 174 akun dan konten yang dilabeli bermuatan indoktrinasi dan radikalisme, Direktorat Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo mencatat 116 konten berasal dari platform X yang dulu dikenal dengan Twitter, lalu 46 konten berasal dari Facebook, 11 konten dari Instagram, dan satu konten

dari Youtube.

Langkah pemutusan akses tersebut dilakukan sekaligus untuk mendukung visi Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024. Budi mengatakan hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Pemutusan akses dilakukan Kemenkominfo dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Budi menyatakan pemanfaatan teknologi untuk mencari konten-konten bermuatan negatif dengan gencar dilakukan Kemenkominfo dalam rangka menciptakan ruang digital yang positif dan produktif menjelang Pemilu 2024.

"Kemenkominfo terus melakukan pencarian konten dalam situs web atau platform dengan menggunakan mesin AIS setiap 2 jam sekali," ungkap Budi.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan aduan apabila melihat konten-konten yang diduga bermuatan negatif dan dapat merusak persatuan bangsa.

Masyarakat bisa dengan leluasa menghubungi Kemenkominfo ke berbagai kanal media sosial ataupun situs web aduan resmi. Pihaknya telah menyediakan saluran pengaduan di *Aduankonten.id* atau akun X *@aduan_konten*. (Ant/P-2)